

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ramalan para futurolog bahwa abad ke-21 akan mejadi era kebangkitan bagi kaum perempuan tampaknya bukanlah omong kosong belaka. Milenium ketiga telah membuktikan ramalan tersebut era yang menjadi saksi merebaknya pemimpin-pemimpin perempuan di seluruh penjuru bumi.¹ Salah satu buktinya adalah terbentuknya organisasi perempuan *Rahima* yang berdiri tahun 2000 dengan memkuskan kerjanya sebagai pusat pendidikan dan informasi tentang hak-hak perempuan dalam Islam dan Pendidikan Orang Dewasa (*andragogy*) dengan peserta gerakan para pemuka agama, pimpinan pesantren, pimpinan majlis ta'lim, guru-guru agama di sekolah-sekolah tingkat menengah dan organisasi-organisasi mahasiswa-mahasiswi Islam; *Fahmina* (berdiri tahun 2000) di Cirebon yang bekerja untuk penyadaran publik dengan tiga isu utama yakni Islam dan demokrasi (Isdem), Islam dan gender (Isgen) serta Islam dan otonomi komunitas (Iskom) yang didekati dari sudut Islam dan tradisi keilmuan pesantren.

Dalam bidang kajian Islam terbentuk juga komunitas seperti Perempuan Kajian Islam dan Sosial (LKIS), terbentuk tahun 2006 dengan melakukan kajian dan pelatihan hak-hak perempuan dalam Islam, penerbitan buku-buku tentang hak-hak perempuan dan

¹ Retno Wulan, Tyas, *Pemetaan Gerakan Perempuan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Penguatan Public Sphere di Pedesaan*, (PSG STAIN Purwokerto: Jurnal YIN YANG Vol 3 No 1, Jan-Jun 2008), hal.

pendampingan perempuan korban kekerasan, terutama di komunitas-komunitas pesantren dan majlis ta'lim.²

Ini adalah salah satu bukti bahwa kebangkitan kaum perempuan mulai terlihat dan semakin maju dengan banyak berdirinya komunitas-komunitas atau organisasi perempuan yang bergerak dalam bidangnya masing-masing. Selain itu implikasi dari terbentuknya organisasi atau komunitas perempuan adalah mulai banyak kaum perempuan yang tersadarkan akan pentingnya kemajuan, penyetaraan dan pemberdayaan perempuan karena banyak juga komunitas yang melakukan pemberdayaan terhadap perempuan sebagai langkah untuk membantu dan memajukan kehidupan perempuan menjadi lebih bermartabat.

Sejarah perkembangan gerakan perempuan dimulai oleh pikiran Kartini sampai akhirnya mulai terbangunnya gerakan perempuan seperti Wanita Oetomo, Wanita Muljo, Jong Java Meiskering, Putri Mahardika (1912), dan Aisyiyah, (1917). Begitu juga ketika masuk masa Orde Lama banyak gerakan wanita yang muncul dalam usahanya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mencoba membangun relasi dengan negara seperti Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) yang merupakan sayap politik dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Kowani, dan Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia). Tidak hanya organisasi perempuan berhaluan nasionalis, organisasi perempuan keagamaan juga memainkan peran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Fase selanjutnya masuk ke dalam era Orde Baru dimana organisasi perempuan berubah menjadi organisasi fungsional. Perwari yang pernah sangat artikulatif menentang

²http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/04/GERAKAN-PEREMPUAN-DI-ERA-REFORMASI_Neng-Dara-Affiah-21-April-2014.pdf di kutip pada tanggal 13 Nopember 2015 pukul 09.49 WIB

Presiden Soekarno berpoligami, kini tinggal sebagai organisasi yang terutama beranggotakan istri-istri pegawai negara, kegiatan yang mengarah pada kesejahteraan keluarga menengah atas. Wanita demokrat yang sebelumnya mempunyai kegiatan bergaris masa dan berhubungan erat dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) menunjukkan keadaan serupa setelah PNI difusikan ke dalam Partai Demokrat Indonesia (PDI). Jadi, organisasi perempuan di Indonesia mengalami proses domestikasi dengan implikasi terjadinya penjinakan, segregasi, dan depolitisasi. Hal ini semakin menunjukkan bentuknya setelah Dharma Wanita (1974) dan Dharma Pertiwi diresmikan sebagai istri pegawai negeri sipil dan istri anggota ABRI. Organisasi perempuan kini memasuki periode “tidak ada perlawanan” terhadap diskriminasi dan eksploitasi yang dialami kaum perempuan di Indonesia.³

Pada mulanya gerakan perempuan menekankan pendidikan dan sarana untuk membuka cakrawala pengetahuan perempuan. Kesadaran seperti ini yang akhirnya disebut dengan “ emansipasi wanita “ bahwa derajat perempuan sama dengan laki-laki. Dalam Islam tidak menghalangi kaum wanita untuk memasuki berbagai profesi bahkan bila mampu dan sanggup, boleh menjadi perdana menteri atau kepala negara, asal dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam, misalnya tidak terbengkalai urusan dan keahliannya, seperti menjadi guru/dosen, dokter, pengusaha, menteri, hakim, dan lain-lain, tugasnya dalam rumah tangga.⁴ Sampai pada akhirnya kegiatan wanita bukan lagi mengarah pada kegiatan

³ Retno Wulan, Tyas, *Pemetaan Gerakan Perempuan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Penguatan Public Sphere di Pedesaan*, (PSG STAIN Purwokerto: Jurnal YIN YANG Vol 3 No 1, Jan-Jun 2008), hal.2.

⁴ Effendi, Djohan, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hal. 246.

domestik, mulai juga memasuki ranah publik khususnya dalam hal pengambilan keputusan. Kesadaran kaum perempuan mulai mengkristal dalam kesadaran berpolitik ketika diadakannya Kongres Perempuan I di Yogyakarta tahun 1928 bahwa kesadaran perempuan akan terus meningkat apabila perempuan dalam susunan masyarakat berada di posisi yang tidak terjajah.⁵ Sejak saat itu, gerakan kaum perempuan mulai meningkat dari masa ke masa hingga saat ini. Banyak wanita dewasa ini yang tidak puas hanya dengan berpangku tangan tinggal di rumah tetapi ingin dapat mengembangkan dirinya sekaligus menyumbangkan kepandaian dan keahliannya bagi masyarakat. Wanita, sebagaimana halnya pria ingin pula berperan serta membuktikan kemampuannya.⁶ Ini adalah bukti dari mulai bangkitnya kesadaran wanita dalam melihat keadaan dan juga bagian dari gerakan sosial perempuan. Wacana tentang gerakan sosial perempuan memang menjadi kajian menarik semenjak terbangunnya paradigma bahwa peran kaum perempuan dalam masyarakat maupun ranah publik dari waktu ke waktu mulai berkembang pesat khususnya di Indonesia. Perkembangan ini tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi kaum perempuan dengan terbukanya kesetaraan baik dirinya sebagai individu ataupun dirinya sebagai kelompok masyarakat.

Diantara beberapa organisasi dan gerakan perempuan yang telah dijelaskan khususnya kajian mengenai gerakan sosial perempuan memunculkan term atau istilah baru yaitu gerakan sosiofeminisme. Istilah ini sebenarnya perpaduan antara istilah gerakan sosial dan feminisme. Seperti yang dijelaskan oleh Turner dan Killian (1972)

⁵Retno Wulan, Tyas, *Pemetaan Gerakan Perempuan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Penguatan Public Sphere di Pedesaan*, (PSG STAIN Purwokerto: Jurnal YIN YANG Vol 3 No 1, Jan-Jun 2008), hal.1.

⁶S.C. Utami Munandar, *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia, Suatu Tinjauan Psikologis*, (Penerbit Universitas Indonesia tahun 1983), hal 71.

bahwa gerakan sosial adalah tindakan kolektif berkelanjutan untuk mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau dalam kelompok yang menjadi bagian masyarakat itu. Definisi yang dijelaskan oleh Turner dan Killer sebenarnya menekankan pada adanya suatu upaya yang dilakukan oleh perempuan dalam melakukan dan membangun tatanan kehidupan baru atau adanya perubahan dalam sebuah masyarakat yang dilakukan secara bersama. Sedangkan feminisme menurut Kamla Bhasin Akhmad dan Nighat Said Khan (1955:5) adalah suatu paham aliran yang mempunyai kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, di dalam keluarga, disertai tindakan sadar oleh perempuan atau laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.⁷ Hakikat dari feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.⁸

Seiring berjalannya waktu, feminisme bukanlah sekedar sebuah wacana melainkan sebuah ideologi yang hakikatnya perlawanan, anti, dan bebas dari penindasan, dominasi, ketidakadilan, dan kekerasan yang dialami perempuan. Dengan dipahami dari ideologi tentang perlawanan, ini mengindikasikan bahwa dalam feminisme harus ada aksi untuk membebaskan perempuan dari semua ketidakadilan, sehingga feminisme juga memiliki artian gerakan-gerakan intelektual yang muncul dan tumbuh secara akademis maupun bentuk upaya-upaya politik dan sosial perempuan untuk mengakhiri penindasan yang dialami. Sedangkan Mansour Fakih juga menjelaskan bahwa feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada

⁷Farida, Umma, *Teks-Teks Keislaman Dalam Kajian Kaum Feminis: Telaah Terhadap Pendekatan Studi Islam dari Kalangan Feminis Muslim*, (PALASTRÈN: Vol. 3, No. 2, Desember 2010), hal 205.

⁸ Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, *Percakapan...*, 10.

dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut.⁹

Dengan beragamnya anti feminisme, maka akan sulit mendapatkan definisi feminisme dalam semua ruang dan waktu. Hal ini terjadi karena feminisme tidak mengusung teori tunggal, akan tetapi menyesuaikan kondisi sosiokultural yang melatarbelakangi munculnya paham itu serta adanya perbedaan tingkat kesadaran, persepsi, dan tindakan yang dilakukan oleh para feminis.¹⁰ Dengan demikian feminisme bukan lagi sekedar gerakan atau ideologi akan tetapi suatu ajakan atau gerakan untuk bertindak melakukan perubahan dan pembebasan. Dengan tindakan yang nyata akan dapat mengangkat derajat kaum perempuan pada posisi yang sepatutnya. Jika tidak, maka feminisme hanya akan menjadi retorika saja bahkan keberadaannya akan ditelan waktu. Dari pengertian antara gerakan sosial dan feminisme serta penjelasannya maka dibentuklah istilah ini, perpaduan antara kedua istilah tersebut, yaitu sosiofeminisme. Sosiofeminisme adalah sebuah gerakan atau aktifitas di bidang feminisme dan pemberdayaan yang secara massif dilakukan oleh perempuan.

Dalam kaitannya dengan Fatayat NU sebagai salah satu organisasi besar yang telah berkiprah di Indonesia dalam pemberdayaan wanita walaupun dalam sejarahnya ada organisasi perempuan yang telah muncul terlebih dahulu seperti Aisyah, akan tetapi Fatayat NU ini yang fokus utamanya adalah bergerak di masyarakat pedesaan dan dunia pesantren berbeda dengan Aisyah yang bergerak di masyarakat perkotaan yang lebih terdidik dan modern. Dalam sejarahnya juga Fatayat NU sebagai salah satu organisasi

⁹ Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal 82

¹⁰ Umul Barorah, "Feminisme dan Feminis Muslim", "dalam" *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, "ed". Sri Suhandjati Sukri (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal 183-184.

perempuan yang bergerak dan memang muncul di masyarakat pedesaan dan dunia pesantren, ada satu keunikan yang dimilikinya yaitu di satu sisi Fatayat NU mempertahankan tradisi masyarakat pedesaan yang sangat kental dengan budaya patriarkat dan belum maju dalam hal mobilitas sosial ditambah lagi dengan dunia pesantren yang sangat bias gender. Satu sisi juga bahwa Fatayat ingin mengembangkan dirinya dengan mengadopsi pemikiran modern tentang pemberdayaan perempuan. Ini yang penulis katakan sebagai perpaduan antara doktrin pesantren dan doktrin emansipatif yang ada dalam diri Fatayat NU. Perpaduan inilah yang penulis sebut juga sebagai implementasi dari gerakan sosiofeminisme, adanya hubungan antara gerakan sosial yang diusung perempuan terhadap kemajuan sosial masyarakat.

Karakteristik ini dalam tren penelitian tentu sangat menarik, karena di era desentralisasi saat ini pemberdayaan dan pembangunan sosial masyarakat melalui perempuan harus dikedepankan. Inilah sisi kebaruan dan kemajuan pertama dari penelitian ini. Kebaruan kedua, sejauh yang dapat ditelusuri, penelitian yang mendalam dengan keterkaitan antara organisasi perempuan yang mengusung “pembangunan sosial masyarakat”, belum banyak yang meneliti. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya mengkaji gerakan feminis, pembelaan atau advokasi perempuan, peran politik perempuan, dan beberapa kegiatan domestik lainnya.. Kajian mengenai “perempuan dan pembangunan sosial masyarakat” masih terbilang minim. Dari sinilah penulis mencoba memilih Organisasi Perempuan Fatayat Nahdhatul Ulama (NU). Apakah Fatayat NU dalam tulisan-tulisan jurnal atau buku, siaran radio, film documenter pernah dan sudah mengkampanyekan isu “Perempuan dan Pembangunan Sosial Masyarakat”. Pertanyaan tersebut akan dijawab melalui penelitian ini.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian sebagai berikut :

1. Gerakan sosial perempuan yang peduli terhadap masalah sosial dan yang mengarah pada konteks pembangunan sosial masyarakat dianggap masih sedikit bahkan tidak ada.
2. Bagaimana peran Fatayat NU dalam melihat masalah sosial dalam konteksnya terhadap pembangunan sosial masyarakat.
3. Kemampuan Fatayat NU dengan latar belakang organisasi perempuan keagamaan melihat masalah sosial masyarakat yang ada.

C. PEMBATAAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian hanya pada mendeskripsikan dan menganalisis tentang gerakan sosiofeminisme progresif Fatayat NU dalam konteksnya melakukan pembangunan sosial masyarakat. Adapun untuk mendapatkan info tentang gerakan sosial perempuan peduli masalah sosial adalah dengan melakukan studi lapangan dengan beberapa pertanyaan menurut teori dari para ahli. Penelitian ini difokuskan pada organisasi Fatayat NU.

D. RUMUSAN MASALAH

Biasanya rumusan masalah dikemukakan dalam kalimat pertanyaan sesuai dengan topik yang diteliti, rumusan masalah besar dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana tipologi gerakan sosiofeminisme progresif yang dilakukan oleh Fatayat NU “. Adapun pertanyaan ini dapat *dibreakdown* dengan pertanyaan pembantu, yaitu :

1. Bagaimana Fatayat NU menjadikan dirinya sebagai organisasi perempuan yang peduli terhadap masalah sosial dengan konteks pembangunan sosial masyarakat yang selama ini dianggap masih sedikit bahkan tidak ada ?
2. Bagaimana peran Fatayat NU dalam melihat masalah sosial dalam konteksnya terhadap pembangunan sosial masyarakat ?
3. Bagaimana Fatayat NU dengan latar belakang organisasi perempuan keagamaan melihat masalah sosial masyarakat yang ada ?

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian merupakan pengulangan dari perumusan masalah yang diungkapkan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah ingin mentipologikan gerakan yang dilakukan oleh Fatayat NU yang dikemukakan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis cara pemberdayaan Fatayat NU kepada anggotanya dalam konteks pembangunan sosial masyarakat.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi dari peran Fatayat NU upaya pembangunan sosial masyarakat bertemakan perempuan dan gerakan sosial masyarakat.
3. Menganalisis peran Fatayat NU dalam mengaplikasikan nilai yang dimilikinya serta mendeskripsikan secara mendalam struktur Fatayat NU.

F. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, maka penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji atau merevisi suatu teori apapun.

Penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi berkontribusi secara akademik bagi khazanah keilmuan dan keislaman serta menjadi pendukung sebuah teori antara teori gerakan sosial dan teori feminisme dimana keduanya dapat menjadi teori baru dengan adanya penelitian ini.
2. Secara praktis penelitian ini akan memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya :
 - A. Bagi Lembaga Pendidikan penelitian ini akan memberikan manfaat khususnya dalam pengembangan keilmuan dan wawasan keilmuan. Bagi mahasiswa penelitian ini bisa menjadi referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lanjut atau penelitian transdisiplinalitas atau mengintegrasikan sudut pandang lain dalam kajian sosial

- B. Untuk Pemerhati atau Peneliti akan bermanfaat dalam melakukan penelitian yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda dan skup yang lebih luas. Sehingga pengembangan keilmuan dalam bidang perempuan dan gerakan sosial masyarakat akan terus berkembang.
- C. Khusus bagi pemegang otoritas seperti pemerintah akan bermanfaat sebagai dasar kebijakan untuk pengembangan ormas perempuan.
- D. Sedangkan bagi Fatayat NU akan bermanfaat sebagai tambahan referensi dalam pengembangan pemberdayaan perempuan dalam konteksnya pembangunan sosial masyarakat.

G. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang condong ke kualitatif tetapi juga bisa kuantitatif, menurut Cavaye (1996) dalam suatu penelitian studi kasus dapat menggabungkan dua metode melalui wawancara mendalam, sebuah studi kasus dapat melakukan analisis kualitatif terhadap isu spesifik yang kemudian dapat dijadikan variabel terukur dan selanjutnya dianalisis secara kuantitatif (Pendit, 2003: 256).

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan format (jenis) deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan suatu masalah, menjelaskan masalah tersebut, dan menganalisis dengan perangkat teori-teori serta konsep-konsep yang relevan. Penelitian deskriptif-analitis dapat dimulai dengan tanpa menggunakan suatu asumsi,

tetapi sudah diawali dengan kerangka topik dan persoalan yang akan diteliti. Metode atau aspek kemetodean dalam rancangan penelitian kualitatif sesungguhnya tidak dituntut untuk dirinci sedemikian rupa. Metode dalam rancangan penelitian kualitatif lebih pada penegasan dan penjelasan yang menunjuk pada prosedur-prosedur umum kemetodean yang akan digunakan, seperti pendekatan berikut alasan mengapa pendekatan tersebut digunakan, unit analisis, metode pengumpulan dan analisis data serta keabsahan data.¹¹

Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹² Format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu.¹³ Dalam konteks penelitian ini, peneliti memberikan gambaran dan pendeskripsian tentang gerakan sosiofeminisme, yaitu perpaduan antara gerakan sosial dan gerakan feminisme yang dilakukan oleh Fatayat NU (Nahdhatul Ulama).

Sesuai masalah yang diteliti, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek atau kelompok yang diamati. Kemudian pendekatan kualitatif ini memerlukan ketajaman analisis, obyektifitas, dan sistematis sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi, sebab hakikat dari suatu fenomena atau

¹¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm 47.

¹² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal 4.

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 48.

gejala bagi pendekatan kualitatif adalah totalitas atau gestalt.¹⁴ Dengan demikian, ada beberapa alasan peneliti yang dapat dikemukakan berkaitan dengan penggunaan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif (deskriptif), diantaranya: Pertama, individu-individu yang di dalam menghadapi lingkungan sosialnya, memiliki strategi bertindak yang tepat bagi dirinya sendiri, sehingga memerlukan pengkajian yang mendalam. Penelitian kualitatif memberikan peluang bagi pengkajian mendalam terhadap suatu fenomena. Kedua, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk meneliti fenomena secara holistik.

Fenomena yang dikaji merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan karena tindakan yang terjadi di kalangan masyarakat (subjek penelitian) bukanlah tindakan yang diakibatkan oleh satu dua faktor melainkan melibatkan banyak faktor yang saling terkait. Keempat, penelitian kualitatif lebih didasarkan pada pendekatan emik dengan memahami fenomena dari sudut pandang subjek (informan) penelitian setempat (from the native points of view).¹⁵ Karena itu, dalam penelitian ini peneliti mendalami sekaligus mengamati bagaimana gerakan sosiofeminisme yang dilakukan oleh Fatayat NU dalam konteks pemberdayaan perempuan.

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sasaran penelitian dianggap sebagai subjek yang ditempatkan sebagai sumber informasi. Dari subyek penelitian ini, peneliti menggali data secara mendalam sesuai dengan konteks penelitian. Subyek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fatayat NU (Nahdhatul Ulama). Pemelihan Fatayat NU

¹⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 3

¹⁵ Nur Syam, *Islam Pesisir.....*, hal. 57.

sebagai subyek penelitian didasarkan karena Fatayat NU memiliki latar belakang, dinamika organisasi yang cukup matang dan terus selalu melakukan perubahan ditambah lagi dengan *background* organisasi yang memiliki keunikan tersendiri.

Di sisi lain, subyek penelitian yang dipilih adalah Fatayat NU yang memang berisikan para perempuan nahdliyyin dengan kultur pesantrennya yang sangat kuat, ini memberikan kekhasan tersendiri dalam pembahasan penelitian karena bagaimana Fatayat NU dalam upayanya memberdayakan wanita dengan latar belakang pesantren yang menganut sistem patriarkat yang kuat. Hal ini relevan dengan konteks penelitian penulis yang mengangkat tentang gerakan sosiofeminisme progresif dalam konteks pemberdayaan perempuan khususnya Fatayat NU.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer berupa kata-kata dan tindakan, hal ini berdasarkan pendapat Lexy J. Moelong dalam bukunya, bahwa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau perekam video, pengambilan foto atau atau rekam suara.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggali data dengan mencatat secara tertulis dan rekaman. Dalam proses pengumpulan data, keberadaan peneliti disamping sebagai instrument sekaligus menjadi pengumpul data yang keberadaannya mutlak diperlukan. Peneliti menentukan informan sebagai sumber data primer dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu

¹⁶ Lexy J Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal 157

teknik pengambilan sample yang ditentukan peneliti sendiri berdasarkan pengetahuan yang jeli terhadap karakteristik subjek penelitian yang dianggap “kunci”.

4. Tahap Analisis Data

Menurut Lexy J. Moeleng, proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan sebagainya.¹⁷ Menurut Bogdan dan Taylor (1991), secara singkat ada tiga tahap yang bisa dilakukan dalam analisis data penelitian kualitatif ini, yakni :

1. Tahap penemuan. Data yang terkumpul sejak awal penelitian diidentifikasi sesuai tema kemudian data tersebut diklasifikasikan berdasarkan sub-sub tema bahasan yang relevan dengan konteks penelitian.
2. Tahap memberi kode, yang meliputi mengkategorikan setiap tema dan memilah data dengan cara memisah catatan lapangan dan bahan dokumen per tema. Menurut Lexy J. Moeleong, tahap memberi kode bisa disebut juga sebagai proses penafsiran data. Analisis menafsirkan data itu dengan jalan menemukan kategori-kategori dalam data yang berkaitan dengan yang biasanya dimanfaatkan dalam disiplin atau dalam cara bercakap. Atas dasar itu penulis menyusunnya dengan jalan menghubungkan kategori-kategorinya ke dalam kerangka sistem kategori yang diperoleh dari data.¹⁸
3. Tahap penulisan merupakan tahap untuk memahami data dalam bentuk penulisan secara lebih lanjut, artinya engan melihat, merangkai, dan menghubungkan data serta informasi

¹⁷ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ... , hal. 190

¹⁸ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ... , hal. 198

agar dapat disusun, sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman. Data-data yang sudah tertulis, diklasifikasikan, dan diberi kode selanjutnya ditulis dalam bentuk penulisan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam skripsi ini penulis membagi dalam lima bab. Bab 1 akan memaparkan mengenai latar belakang masalah beserta permasalahannya. Disini penulis mengangkat mengenai gerakan sosial dan feminisme beserta pembangunan sosial masyarakat. Dari pengertian gerakan sosial dan feminisme serta konteksnya dalam pembangunan sosial masyarakat yang dilakukan oleh Fatayat NU.

Bab dua penulis akan menjelaskan tentang teori gerakan sosial menurut beberapa tokoh begitu juga teori tentang feminisme dalam perspektif Islam. Selain gerakan sosial dan feminisme, penulis juga akan memaparkan tentang konseptualisasi gerakan progresif dan konseptualisasi pemberdayaan perempuan dalam sebuah organisasi. Karena penelitian ini bicara tentang organisasi perempuan, penulis juga akan memaparkan tentang organisasi perempuan khususnya organisasi perempuan berhaluan keagamaan.

Kemudian dalam bab tiga penulis memaparkan tentang profil Fatayat NU sebagai organisasi perempuan berhaluan keagamaan. Bagaimana Fatayat NU dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang berlatar belakang perdesaan. Sebagai organisasi perempuan berhaluan keagamaan bagaimana Fatayat NU

melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam konteks pembangunan sosial masyarakat.

Pada bab 4 penulis akan mencoba menganalisis dan mendeskripsikan tentang bagaimana Fatayat NU menjadikan dirinya sebagai organisasi perempuan yang peduli terhadap masalah sosial dalam konteks pembangunan sosial masyarakat, bagaimana Fatayat NU melihat masalah sosial dalam konteks pembangunan sosial masyarakat, dan bagaimana Fatayat NU sebagai organisasi perempuan melihat masalah sosial masyarakat yang ada.

Kemudian yang terakhir pada bab 5 penulis akan menyimpulkan dan memberikan saran dari hasil analisis dan deskripsi dari bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Gerakan Sosial dan Feminisme

1. Pendahuluan

Sebuah gerakan sosial, apapun latar belakang historis terbentuknya, pada hakekatnya menekankan pada satu tujuan utama gerakan yaitu sebuah perubahan. Tidak menjadi masalah apakah perubahan yang diinginkan bersifat infrastruktur atau suprastruktur. Semenjak manusia mulai hidup berkelompok, dan selanjutnya membentuk suatu komunitas dalam sebuah lingkungan sosial sendiri dengan dibatasi oleh wilayah darat, laut dan udara beserta seperangkat aturan main yang bersifat hukum dan politik, maka sejarah mencatat banyak momen penting bagaimana sebuah gerakan sosial mampu menjadi motor penggerak utama perubahan sosial.

Gerakan sosial tersebut memunculkan peran kelompok yang mampu merubah tatanan infrastruktur maupun suprastruktur kehidupan berbangsa dan bernegara atas negara yang bersangkutan.¹⁹ Dalam sejarahnya revolusi atau kudeta yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti Amerika, Perancis, Rusia, revolusi industri bahkan revolusi kemerdekaan Indonesia distimulasi oleh berbagai situasi dan kondisi yang melahirkan gerakan sosial, dan gerakan sosial tersebut menjadi subyek representatif pembawa format perubahan sosial. Ini menunjukkan bahwa setiap gerakan sosial yang terjadi selalu

¹⁹ Hidayat, Rizal A, Gerakan Sosial Sebagai Agen Perubahan Sosial, (Forum Ilmiah Indonesia: Vol. 4, No. Januari 2007), hal 15.

mengarah pada terjadinya perubahan sosial terlepas dari intrastruktur atau suprastruktur yang berubah.

2. Konsep Gerakan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan sekelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada.²⁰ Selain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada juga dari beberapa tokoh yang memberikan pengertian gerakan sosial seperti Rudolf Heberle (1949), yaitu upaya kolektif untuk perubahan sosial. Herbeert Blumer (1939) memberikan makna dari gerakan sosial adalah usaha bersama untuk membangun tata kehidupan baru, sedangkan menurut Giddens adalah tindakan kolektif berkelanjutan untuk mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau dalam kelompok yang menjadi bagi masyarakat itu.

Dalam sosiologi, gerakan tersebut diatas diklarifikasikan sebagai suatu bentuk perilaku kolektif tertentu yang diberi nama gerakan sosial. Sejumlah ahli sosiologi menekankan pada segi kolektif dan gerakan sosial ini, sedangkan diantara mereka ada pula yang menambahkan segi kesengajaan, organisasi dan kesinambungan. Sebagai sebuah aksi kolektif, umur gerakan sosial tentu sama tuanya dengan perkembangan peradaban manusia. Perubahan suatu peradaban ke peradaban lain tidaklah selalu melalui jalan “damai” bahkan sejarah membuktikan perubahan peradaban masyarakat kerap terjadi melalui gerakan-gerakan kolektif atau yang lebih dikenal dengan istilah gerakan sosial sekarang ini (Situmorang 2007). Gerakan sosial lahir dari sebuah kondisi

²⁰ Kamusbahasaindonesia.org, diakses pada 23 Nopember 2015 pukul 17.38 WIB

masyarakat karena tidak adanya keadilan dan sikap sewenang-wenang dalam sebuah masyarakat. Ada beragam definisi gerakan sosial yang diberikan oleh para tokoh namun umumnya beririsan dalam beberapa hal yakni kolektivitas tindakannya dan adanya tujuan yang ditetapkan sebagai bentuk perubahan yang diharapkan. Diantara para tokoh yaitu

1. Rudolf Heberle (1949) : gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk perubahan sosial.
2. Herbert Blumer (1939): gerakan sosial adalah usaha bersama untuk membangun tatanan kehidupan baru.
3. Turner dan Killian (1972): gerakan sosial adalah tindakan kolektif berkelanjutan untuk mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau dalam kelompok yang menjadi bagian masyarakat itu.
4. Giddens (1993): gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama melalui tindakan kolektif diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.
5. Menurut Baldrige gerakan sosial merupakan sebuah bentuk perilaku kolektif yang terdiri atas kelompok orang-orang yang memiliki dedikasi dan terorganisasi untuk mempromosikan atau sebaliknya menghalangi terjadinya perubahan.²¹

Namun, meskipun memiliki kesamaan diantara beberapa definisi, dari sisi kolektivitas dan tujuan bersama, gerakan sosial muncul dengan berbagai bentuk yang

²¹ Jurnal Politik Muda, Vol. 1, No. 1, Oktober-Desember 2012, hal 38.

berbeda. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial berkaitan dengan aksi organisasi atau kelompok civil society dalam mendukung atau menentang perubahan sosial.²² Secara singkat dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial berkaitan dengan aksi organisasi atau kelompok civil society dalam mendukung atau menentang perubahan sosial. Ada berbagai faktor yang menyebabkan definisi gerakan sosial berbeda antara satu dengan yang lain, diantaranya dari sisi bidang perubahan, kualitas perubahan, target perubahan, tujuan perubahan, latar belakang sebuah perubahan, dan perbedaan dari sisi periode kemunculan. Dalam sejarahnya gerakan sosial juga dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Jadi ada sekelompok besar rakyat yang terlibat secara sadar untuk menuntaskan sebuah perubahan sosial. Selanjutnya gerakan sosial ini gelombang pergerakan dari individu-individu, kelompok yang mempunyai tujuan yang sama yaitu suatu perubahan sosial. Indikasi awal untuk menangkap gejala sosial tersebut adalah dengan mengenali terjadinya perubahan-perubahan pada semua elemen arena public dan ditandai oleh kualitas “aliran” dan “gelombang”. Dalam prakteknya suatu gerakan sosial dapat diketahui terutama lewat banyak organisasi baru yang terbentuk, dan bertambahnya anggota dalam suatu organisasi gerakan.

Selain itu menurut Lofland dua aspek empiris gelombang yang perlu diperhatikan adalah pertama aliran tersebut cenderung berumur pendek antara lima sampai delapan tahun. Jika telah melewati umur itu gerakan akan melemah. Kedua, banyak organisasi gerakan atau proses yang berubah menjadi gerakan sosial atau setidaknya bagian dari gerakan-gerakan tersebut diatas. Organisasi-organisasi ini cenderung selalu berupaya menciptakan gerakan sosial atau jika organisasinya berbeda maka mereka akan dengan sabar menunggu pergeseran struktur makro yang akan terjadi atau pertarungan yang akan

²² Jurnal Politik Muda, Vol. 1, No. 1, Oktober-Desember 2012, hal 35

terjadi antara yang baik dan yang jahat, atau kedua hal tersebut. Serta menunggu kegagalan fungsi lembaga sentral, kala itulah gerakan itu bisa dikenali sebagai gerakan pinggiran, gerakan awal dan embrio gerakan. (Lofland, 2003 : 50).

Menurut John Lofland, ada 17 variabel yang berpengaruh terhadap gerakan sosial, yaitu :

- a. Perubahan dan ketimpangan sosial
- b. Kesempatan politik
- c. Campur tangan negara terhadap kehidupan warga
- d. Kemakmuran (yang menimbulkan deprivasi ekonomi)
- e. Konsentrasi geografis
- f. Identitas kolektif
- g. Solidaritas antar kelompok
- h. Krisis kekuasaan
- i. Melemahnya kontrol kelompok yang dominan
- j. Pemfokusan krisis
- k. Sinergi gelombang warga negara (penduduk)
- l. Adanya pemimpin
- m. Jaringan komunikasi
- n. Integrasi jaringan diantara para pembentuk potensial
- o. Adanya situasi yang memudahkan para pembentuk potensial
- p. Kemampuan mempersatukan

Perlu diperhatikan juga ada beberapa faktor pengaruh terhadap jalannya gerakan sosial, gagasan ini dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

Aspek mikro (Internal diri actor)	Aspek makro (Eksternal diri aktor)
Ideologi diri	Kondisivitas structural
Nilai-nilai diri	Ketegangan structural
Perspektif memandang suatu fenomena	Penyelenggaraan pemerintah
Sumber daya diri	Strategi pembangunan
Komitmen diri	Situasi dan kondisi yang sedang berlangsung

Sumber : (Wahyudi, 2005 : 198)

3. Mobilisasi Gerakan Sosial

Mobilisasi merupakan proses dimana sebuah kelompok melakukan kendali kolektif atas sumber daya yang dibutuhkan untuk tindakan kolektif atas sumber daya yang dibutuhkan untuk tindakan kolektif (Jenkins 532-533). Karena itu, isu utamanya adalah sumber daya yang dikendalikan oleh kelompok lebih dahulu sebelum usaha untuk mobilisasi, proses dimana kelompok mengumpulkan sumber daya dan mengarahkannya untuk perubahan sosial dan derajat dimana orang-orang diluar kelompok menambah jumlah sumber daya. McCarthy dan Zald menyebutkan berbagai sumber daya seperti uang, fasilitas, tenaga kerja, dan legitimasi. Ada juga yang menawarkan tipe seperti tanah, tenaga kerja dan keahlian teknis. Freeman (5) membedakan asset yang tangible

seperti uang, fasilitas dan alat-alat komunikasi. Asset yang intangible atau disebutnya sebagai “human asset” yang membentuk basis sentral dari gerakan yang meliputi sumber daya yang terspesialisais seperti pengorganisasian dan keterampilan hukum dan tenaga kerja pendukung yang tidak terspesialisasi.

Dari sisi sumber daya, terdapat pergeseran pemikiran. Kajian tradisional berasumsi bahwa sumber daya gerakan sosial kontemporer berasal dari penerima manfaat langsung dari perubahan sosial. Dan karena gerakan berada diluar institusi politik, sumber dayanya bersasal dari sumber daya yang tidak terlembaga.

Mc Carthy dan Zald (1977) berargumen bahwa gerakan sekitar tahun 1960 an hingga 1970 an memobilisasi “conscience constituency” yang sejahtera, kelas menengah yang makmur (termasuk mahasiswa) dan sumber daya lembaga privat, yayasan, lembaga kesejahteraan sosial, media massa, universitas, lembaga pemerintahan dan bahkan korporasi bisnis. Karenanya terjadi pergeseran dari organisasi gerakan sosial klasik dengan kepemimpinan indigenous, staf yang bekerja secara sukarela, keanggotaan yang besar, sumber daya yang berasal dari penerimaan manfaat langsung dan tindakan yang didasarkan pada partisipasi massa, menjadi organisasi gerakan sosial profesional dengan kepemimpinan yang bersasal dari luar, staff purna waktu yang dibayar, keanggotaan yang kecil/terbatas, sumber daya bersasal dari *conscience constituencies* dan tindakan yang “*speak for*” ketimbang melibatkan kelompok korban. Terdapat tiga fitur berbeda dari usaha untuk melakukan mobilisasi yang membedakan tingkat mobilisasinya.

Pertama adalah agency yang dimaknai sebagai jumlah usaha yang diinvestasikan dalam tindakan sosial. Variasi tingkatan usaha ini menentukan jumlah usaha yang

diinvestasikan dalam tindakan sosial. Variasi tingkatan usaha ini menentukan jumlah dan jenis sumber daya yang dimobilisasi. Diharapkan agar makin banyak usaha yang dilakukan oleh aktivis, makin banyak sumber daya yang dimobilisasi. Kedua, dalam teori dan penelitian tentang organisasi dan gerakan, peran strategi sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Gerakan sosial umumnya melakukan satu atau lebih strategi, diantaranya *public education* yang melibatkan usaha untuk menyampaikan kondisi sosial kepada audiens yang lebih luas, *direct service* kepada korban dari kondisi sosial, pemimpin gerakan dan pengikutnya yang dinyatakan sebagai “*tidak bisa diterima*”, *structural change* yang melibatkan usaha untuk mengubah hukum, otoritas dan atau rezim dan terkadang menggunakan “taktik yang tidak teratur”

Karakteristik umum kelompok-kelompok lokal umumnya menggabungkan tiga strategi tersebut dan biasanya tidak rata besarnya. Banyak tindakan menggunakan lebih dari satu strategi pada satu waktu. Bagi organisasi gerakan sosial, penerapan tiga strategi ini membawa konsekuensi terhadap mobilisasi sumber daya karena tipe dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan bisa berbeda-beda. Misalnya, jika penekanan strategi adalah pada *direct service* sumber daya yang dibutuhkan adalah tenaga dan modal. Akhirnya, variasi dalam organisasi tindakan kelompok akan menyebabkan perbedaan pada tingkat mobilisasinya. Beberapa analisis memberi perhatian pada derajat dimana gerakan secara formal diorganisir. Sebagian kecil berfokus pada pola variabel dari organisasi gerakan dan kebanyakan mengkaji satu kelompok atribut, sentralisasi dan birokratisasi. Faktanya, gerakan yang bersifat sukarela menunjukkan sedikit variasi dari dimensi ini, karena memiliki hirarki yang rata dan formalitasnya rendah. Dimensi lain

organisasi seperti struktur kelompok kerja, proses kepemimpinan bisa jadi lebih penting dalam memahami kelompok masyarakat lokal.

Satu pendekatan umum untuk memobilisasi konstituen dan mengkoordinasikan kegiatan mereka dengan pemimpin-pemimpin ini adalah melalui pertemuan-pertemuan. Salah satu jenis pertemuan menumpulkan pemimpin atau kader bersama-sama untuk memetakan strategi dan rencana kegiatan. Pertemuan yang demikian memiliki fungsi koordinasi. Jenis pertemuan lain adalah pertemuan anggota yang dilakukan untuk memotivasi, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan anggota, dan dapat juga dilangsungkan untuk tujuan pengambilan keputusan. Bentuk lain dalam organisasi yang secara luas diadopsi adalah melalui pembentukan kelompok kerja dimana kelompok tersebut diberikan tugas-tugas atau fungsi tertentu. Mekanisme ini potensial untuk menggaet lebih banyak pengikut dan memberikan kesempatan kepada orang yang tertarik untuk terlibat dalam sub kegiatan dalam organisasi.

4. Konsep Feminisme

Hingga kini masih banyak orang yang salah memaknai feminisme sehingga seringkali kita melihat orang sinis tatkala disebut kata tersebut. Mereka berasumsi bahwa feminisme adalah gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki. Feminisme dianggap sebagai bentuk pemberontakan kaum perempuan untuk mengingkari kodrat atau fitrah perempuan, melawan pranata sosial yang ada, atau institusi rumah tangga, seperti perkawinan dan lain sebagainya. Akibat dari kesalahpahaman ini, maka feminisme kurang mendapat respon positif di kalangan perempuan itu sendiri, apalagi laki-laki,

bahkan secara umum ditolak oleh masyarakat.²³ Ini menunjukkan bahwasanya pengertian feminisme belum memiliki pengertian yang kuat dan belum ada definisi yang bisa dijadikan rujukan. Sejatinya, secara bahasa atau etimologis kata “feminisme” berasal dari bahasa latin, yaitu femina, yang dalam bahasa inggris diterjemahkan menjadi feminisme, artinya memiliki sifat-sifat sebagai perempuan. Kemudian kata itu ditambah ‘ism’ menjadi feminism, yang berarti bahwa hal ihwal tentang perempuan, atau dapat pula berarti bahwa hal ihwal tentang perempuan. Dalam perkembangan selanjutnya, kata tersebut digunakan untuk menunjukkan suatu teori kesetaraan jenis kelamin (sexual equality). Secara historis, istilah itu muncul pertama kali pada tahun 1895, sejak itu pula feminism dikenal secara luas (Mustaqim, 2003:16).²⁴ Menurut Kamla khmad dan Nighat Said Khan (1955:5) bahwa feminisme adalah suatu paham aliran yang mempunyai kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, di dalam keluarga, disertai tindakan sadar oleh perempuan atau laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Fokus dari ini adalah adanya kebanglitan yang dialami oleh kaum perempuan atas apa yang menimpa mereka sehingga menimbulkan kesadaran untuk bangkit atau melepas dari penindasan yang dirasakan. Senada dengan itu Mansour Fakih memberikan batasan bahwa gerakan feminis merupakan perjuangan dalam rangka

²³ Farida, Umma, *Teks-Teks Keislaman dalam Kajian Kaum Feminis : Telaah Terhadap Pendekatan Studi Islam dari Kalangan Feminis Muslim*, (PALASTRen: Jurnal Vol. 3, No.2, Desember 2010), hal 204.

²⁴ Farida, Umma, *Teks-Teks Keislaman dalam Kajian Kaum Feminis : Telaah Terhadap Pendekatan Studi Islam dari Kalangan Feminis Muslim*, (PALASTRen: Jurnal Vol. 3, No.2, Desember 2010), hal 205.

mentraformasikan sistem dan struktur yang tidak adil menuju sistem yang adil bagi perempuan maupun laki-laki.²⁵

Sebagian besar apa yang diberikan oleh para tokoh tentang definisi feminisme adalah adanya pembelaan dari kondisi yang tidak adil, tidak nyaman dan tidak memberikan keuntungan bagi seorang perempuan. Dengan demikian hakikat dari feminisme adalah adanya kesadaran untuk berjuang dari iskriminasi, ketidakadilan, dan subordinasi perempuan, dilanjutkan dengan sebuah upaya untuk merubahkeadaan tersebut menuju suatu sistem masyarakat yang lebih adil. Untuk menjadi feminis tidak harus berkelamin seorang perempuan. Seorang laki-laki pun dapat menjadi seorang feminis asal memiliki concern dan kesadaran untuk mengubah ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Sehingga, perhatian utama dari gerakan feminisme adalah terciptanya suatu keadilan (*justice*), kesetaraan (*equality*) dalam sistem dan struktur masyarakat.²⁶ Dalam kaitannya dengan studi agama tidak lain merupakan suatu transformasi kritis dari perspektif teoritis yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori analisis utamanya.

5. Feminisme dalam Islam

Feminisme sebagai sebuah pendekatan untuk mengkaji teks-teks keislaman dalam kerangka kerjanya selalu menggunakan analisis gender sebagai alat untuk mempertajam

²⁵ Farida, Umma, *Teks-Teks Keislaman dalam Kajian Kaum Feminis : Telaah Terhadap Pendekatan Studi Islam dari Kalangan Feminis Muslim*, (PALASTRen: Jurnal Vol. 3, No.2, Desember 2010), hal 205.

²⁶ Farida, Umma, *Teks-Teks Keislaman dalam Kajian Kaum Feminis : Telaah Terhadap Pendekatan Studi Islam dari Kalangan Feminis Muslim*, (PALASTRen: Jurnal Vol. 3, No.2, Desember 2010), hal 205.

pandangan mereka. Ini dikarenakan feminisme dan agama keduanya sangat signifikan bagi kehidupan perempuan dan kehidupan kontemporer pada umumnya. Tujuannya utama dari tugas feminis adalah mengidentifikasi sejauh mana terhadap persesuaian antara pandangan feminis dan pandangan keagamaan terhadap keadilan, dan bagaimana menjalin interaksi yang paling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain (Connolly, 1999: 63). Adapun analisis gender difungsikan untuk memberi makna, konsepsi, asumsi, ideology dan praktik hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik, cultural), yang tidak dilihat oleh teori ataupun analisis sosial lainnya.²⁷

Dalam kajian kaum feminis muslim, berbagai teks keislaman yang berpihak pada tradisi patriarkhal harus diinterpretasi ulang untuk memperoleh substansi teks yang egaliter. Sehingga, kajian feminisme dapat dikategorikan sebagai kajian sosiologis dan teologis. Dalam perspektif sosiologis, kajian feminisme berusaha mengkaji persoalan kesetaraan gender melalui dekonstruksi sistem patriarkhal dan rekonstruksi sistem egaliter dalam struktur masyarakat. Kajian feminisme perspektif teologis berusaha melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keislaman yang mengandung muatan sistem patriarkhal. Teologi pembebasan yang diterapkan untuk membebaskan perempuan dari ketertindasan disebut teologi feminisme (*theology of feminism*). Teologi feminisme adalah gerakan reformis dan revolusioner untuk mendekonstruksi ideology an pemahaman keagamaan yang bias kelakuan. Dekonstruksi ini bertujuan untuk menghapus patriarki, dan mencari landasan teologis atas kesetaraan gender. Gender bukan semata-mata

²⁷ Farida, Umma, *Teks-Teks Keislaman dalam Kajian Kaum Feminis : Telaah Terhadap Pendekatan Studi Islam dari Kalangan Feminis Muslim*, (PALASTRen: Jurnal Vol. 3, No.2, Desember 2010), hal 211.

persoalan sosiologis, tetapi telah merambah wilayah ketuhanan (Kadariusman: 35).²⁸ Selanjutnya terdapat juga faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya pendekatan feminisme dalam kajian agama Islam, sebagaimana diungkapkan Mustaqim (2003: 62-74) adalah :

a. Faktor Intenal

Kaum feminis musli berpendapat bahwa pada dasarnya bahwa agama islam menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meski, misalnya, Al-Quran menggunakan bahasa (ungkapan) yang secara literal seakan menunjuk pada struktur yang hirarkis, namun secara moral ia justru ingin menghilangkan subordinasi yang dialami oleh perempuan pada masa-masa pra-Islam. Dengan demikian, sesungguhnya ungkapan Al-Quran adalah ungkapan yang sarat dengan upaya pembebasan, termasuk dalam hal ini adalah pembebasan perempuan dari dominasi dan eksploitasi kaum laki-laki dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan.

b. Faktor Eksternal

Kaum feminis sebagian besar hidup dalam lingkungan yang sangat patriarkis dan memamng mereka menyadari bahwa ada pola dan relasi yang berbeda yang ternyata tidak menguntungkan bagi mereka. Kesadaran ini berpengaruh dalam membentuk wacana feminis dalam mengkaji teks-teks agamanya. Rifat Hassan misalnya, dalam otobiografi singkatnya menulis tentang lingkungan di mana ia dilahirkan, yakni di sebuah masyarakat

²⁸ Farida, Umma, *Teks-Teks Keislaman dalam Kajian Kaum Feminis : Telaah Terhadap Pendekatan Studi Islam dari Kalangan Feminis Muslim*, (PALASTRen: Jurnal Vol. 3, No.2, Desember 2010), hal 212.

di Pakistan yang sangat lazim merayakan kelahiran seorang anak laki-laki dan meratapi kelahiran anak perempuan. Feminis muslim lainnya, seperti Fatima Mernissi menghabiskan masa kanak-kanaknya di dalam *harem* (sebuah ruangan yang dikhususkan untuk dihuni oleh perempuan dan dijaga oleh seorang laki-laki). Perempuan yang tinggal di dalam *harem* itu dilarang keras keluar sekalipun untuk keperluan berbelanja. Kaum perempuan di dalam *harem* itu, dipisah dengan kaum laki-laki melalui pembatas dan salah satu dari pembatas ini adalah pintu *harem* yang dijaga oleh laki-laki. Asghar Ali Engineer, seorang feminis laki-laki yang sangat gencar dalam memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini realitas sosiologis, India, negara tempat Asghar berasal, juga sangat berpengaruh dalam mengkonstruksi pemikiran feminis Asghar. Dalam sebagian besar masyarakat India, terutama kalangan menengah ke bawah yang merupakan jumlah mayoritas, kedudukan perempuan dalam keluarga sangatlah lemah.²⁹

Dalam sudut pandang lain, feminisme dipandang sebagai sebuah teori yang menjembatani kesenjangan antara konsepsi keadilan yang mempengaruhi dan menopang penafsiran dominan terhadap syariah disatu sisi, dan hukum Hak Asasi Manusia disisi lain. Ia muncul pada tahun 1990-an dengan penekanan bahwa modernitas merupakan suatu yang kompatibel (memiliki kesesuaian) dengan Islam dan bahwa pemahaman manusia terhadap teks-teks suci Islam merupakan sesuatu yang lentur, teks dapat diinterpretasikan untuk mendorong pluralisme, HAM, demokrasi dan kesetaraan gender (Mir-Hosseini: 2010: 22-23). Dengan mengembangkan hasil kerja para reformis sebelumnya, pemikiran keagamaan baru dan bahasa yang digunakannya ini

²⁹ Farida, Umma, *Teks-Teks Keislaman dalam Kajian Kaum Feminis : Telaah Terhadap Pendekatan Studi Islam dari Kalangan Feminis Muslim*, (PALASTRen: Jurnal Vol. 3, No.2, Desember 2010), hal 215.

dapat membuka suatu dialog baru antara hukum Islam dan hukum HAM internasional. Dialog seperti ini akan membantu mengembangkan kesepakatan bersama dan menyediakan alat-alat konseptual dan bahasa bagi para pembela HAM untuk melibatkan komunitas Muslim.

Feminisme Islam mendasarkan kerangka kerjanya pada sumber-sumber utama ajaran Islam, yakni al-Quran, Hadis dan seperangkat Hukum Islam (Barlas: 2005: 27). Al-Quran bagi umat Islam merupakan serangkaian teks yang diyakini sebagai perwujudan dari wacana ilahi. Ia merupakan sumber kebenaran dan sekaligus sarana untuk mewujudkan kebenaran tersebut dalam bentuk tindakan (Barlas: 2005: 86). Sebagai wacana ilahi, al-Quran tidak bisa ditiru, diubah maupun dipalsukan. Hal yang dapat berubah adalah pemahaman dan penafsiran atasnya.

B. Pemberdayaan Perempuan

1. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata 'daya' yang memiliki arti kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian :

- a. To give ability or enable to, yang diterjemahkan sebagai member kecakapan/kemampuan atau memungkinkan

b. To give power of authority to, yang member kekuasaan.³⁰

Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar 'daya' yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Sementara pemberdayaan juga dimaknai sebagai proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal (Priyono, S. Onny dan Pranarka,A.M.W).

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan yaitu, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Selain itu ada juga yang mengemukakan tentang langkah dalam melakukan pemberdayaan seperti Riant Nugroho (2008) yaitu perlu adanya tiga langkah yang berkesinambungan, diantaranya :

- 1.Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki.
- 2.Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
- 3.Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

³⁰ Dra. Risyanti Riza, Drs.H. Roesmidi, M.M.2006. *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang : ALQAPRINT Jatinangor)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Dalam penelitian ini yang dimaksud pemberdayaan adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh Fatayat NU dalam konteksnya terhadap pembangunan sosial masyarakat.

2. Strategi Pemberdayaan Perempuan

Kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang dengan mulai terwujudnya pendekatan program yang memusatkan pada masalah perempuan dalam pembangunan atau Women in Development (WID), ini didasarkan pada suatu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi perempuan miskin agar pembangunan dapat dinikmati semua pihak. Timbulnya pemikiran perempuan dalam pembangunan karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga yang posisinya termajinalkan perlu diikutsertakan ke dalam pembangunan. Pendekatan perempuan dalam pembangunan (Women in Development) memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan. Tujuan dari pendekatan ini adalah menekankan pada sisi produktivitasnya. Dalam realisasinya konsep WID gagal dalam menyertakan perempuan dalam proses pengambilan keputusan maka dari itu konsep Gender and Development (GAD) sebagai follow-up nya (2008: 140). Dalam konsep ini lebih didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan

dan laki-laki dalam proses pembangunan. Pendekatan ini lebih memuaskan kepada isu gender dan tidak terlihat pada masalah perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan baik kerja produktif, reproduktif, privat maupun public dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Pendekatan ini dikenal sebagai pemberdayaan. Menurut Julia Cleves “ Pemberdayaan ini lebih menekankan pada strategi pemberdayaan dari bawah ke atas (bottom-up) dari pada pemberdayaan dari atas ke bawah (top-down)” (Julia Cleves Moss, 1996: 209-210). Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam peningkatan peran dan peluang perempuan dalam meningkatkan ekonominya serta merupakan upaya peningkatan dan pengaktualisasian potensi diri mereka agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan keterampilan perempuan.

BAB III

FATAYAT dan PEMBERDAYAAN UMAT

Berdirinya Fatayat NU tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Nahdhatul Ulama (NU) sebagai organisasi induk atau kepalanya, dan sejarah Indonesia sebagai tanah airnya. Penjajahan selama bertahun-tahun telah menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk. Perjuangan melawan keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan keterpurukan akibat penjajahan yang cukup lama pada akhirnya mengkristal dan melahirkan semangat baru sampai di seluruh penjuru Indonesia hingga sampai pada puncaknya pada tahun 1908 yang dikenal sebagai Kebangkitan Nasional. Kalangan pesantren merespon spirit ini dengan membentuk berbagai organisasi pergerakan, seperti Nahdhatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916, Taswirul Afkar atau dikenal dengan Nahdhatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran) pada tahun 1918 yang bergerak di bidang pendidikan, sosial politik, Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Kaum saudagar) yang dijadikan basisi untuk memperbaiki perekonomian umat. Pada awalnya kebangkitan organisasi keagamaan seperti NU memang berawal dari sebuah kesadaran akan dirinya yang sedang mengalami keterpurukan dan penindasan pada saat itu, khusus pada NU yang dilatarbelakangi oleh santri-santri mereka berjuang dengan landasan nilai keagamaan, yaitu berjuang membela negara atau jihad *fisabilillah*.

NU memang dikenal dengan sebagai organisasi Muslim tradisional dan sejak awal anggota-anggotanya adalah laki-laki. Namun demikian, pemimpin NU sejak awal telah merespon isu-isu perempuan secara progresif. KH.Wahid Hasyim yang merupakan putera KH Hasyim Asyari misalnya pernah membolehkan perempuan menjadi hakim. Isu

perempuan semakin mendapatkan perhatian ketika Kiai Dahlan mengusulkan berdirinya organisasi perempuan NU di Kongres NU ke XII di Menes Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938. Kongres ini sangat penting karena mulai membicarakan tentang perlunya perempuan mendapatkan kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan agama melalui NU. Ketika itu kongres menyetujui perempuan untuk menjadi anggota NU yang hanya bisa menjadi pendengar dan pengikut dan tidak boleh duduk dalam kepengurusan. Pada saat kongres di Banten ini kekuatan perempuan untuk memberikan suara atau menyampaikan pendapat belum diterima bahkan hanya menjadi pendengar saja. Keadaan seperti ini dimaklumi karena peran dan hak perempuan belum banyak dibutuhkan pada saat itu. Kaum laki-laki masih mendominasi dalam hal administrasi keorganisasian dan pengurusan kader atau anggota.

Puncak dari berdirinya organisasi Fatayat NU adalah pada saat itu Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) menyetujui pembentukan Pengurus Pusat Puteri NUM yang diberi nama Dewan Pimpinan Fatayat NU pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1399 atau bertepatan dengan 14 Februari 1950. Selanjutnya Kongres NU ke-XVIII tanggal 20 April-3 Mei 1950 di Jakarta secara resmi mengesahkan Fatayat NU menjadi salah satu badan otonom NU. Namun berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber bahwa Fatayat NU menyatakan dirinya didirikan di Surabaya pada tanggal 24 April 1950 bertepatan dengan 7 Rajab 1371 H.³¹ Pimpinan pusat pada saat itu adalah Nihayah Bakri (Surabaya) sebagai ketua I dan Aminah Mansur (Siduarjo) sebagai ketua II. Kepengurusan pada waktu itu hanya mempunyai dua bagian, yaitu bagian penerangan dan pendidikan.

³¹ Wawancara dengan Hj. Rahayu Sri Rachmawati, S.Ag, Selasa, 24 November 2015, pukul 11.30 WIB, di gedung Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.

Fatayat NU mempunyai enam bidang utama yang merupakan program kerja selama satu periode yaitu bidang hukum, politik, bidang advokasi, dakwah, dan pembinaan anggota. Selain itu menurut paparan salah satu anggota Fatayat NU, beliau menjelaskan bahwa yang sekarang menjadi kajian utama adalah dalam bidang kesehatan reproduksi dan lingkungan hidup.³²

Karena Fatayat NU sebagai organisasi perempuan atau pemuda maka sasaran utama dari programnya adalah perempuan muda yang berusia antara 20-45 tahun, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat umum untuk mengikuti program Fatayat NU. Dalam kegiatannya sehari-hari juga banyak anggota diluar Fatayat yang ikut serta dalam programnya seperti LSM bahkan Muslimat juga mengikuti beberapa kegiatan yang ada Fatayat NU, ini merupakan turut partisipasi organisasi perempuan lain yang juga memiliki semangat yang sama.³³ Fatayat NU mempunyai visi yakni terwujudnya tatanan sosial masyarakat yang adil dan sejahtera, terbebas dari segala bentuk kekerasan dengan proses yang membangun, demokratis dan berkeadilan jendr. Di sisi itu Fatayat NU mempunyai misi membangun kesadaran kritis perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender.

Dalam kepengurusannya Fatayat NU mengandalkan organisasi seperti pohon, sehingga terdapat pengurus yang terbagi dalam pucuk pimpinan yang berjumlah 61 orang kemudian di bawahnya terdapat pengurus wilayah sebanyak 640 orang, dibawahnya terdapat pengurus cabang sebanyak 4.995 orang dan pengurus anak cabang 13.845 orang

³² Wawancara dengan Hj. Rahayu Sri Rachmawati, S.Ag, Selasa, 24 November 2015, pukul 11.30 WIB, di gedung Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.

³³ Wawancara dengan Hj. Rahayu Sri Rachmawati, S.Ag, Selasa, 24 November 2015, pukul 11.30 WIB, di gedung Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.

dan juga pengurus ranting sebanyak 282.360 orang. Saat ini Fatayat NU dipimpin oleh Anggi Ermarini sebagai ketua umum.

2. Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU)

A. Pengertian dan Lahirnya

Fatayat NU adalah sebuah organisasi pemudi Islam di bawah naungan NU. Fatayat NU lahir pada tanggal 7 Rajab 1369 H atau tanggal 24 April 1950, yang bertepatan dengan muktamar NU ke-18 di Jakarta. Sebelum diresmikan Fatayat NU sudah dirintis di Surabaya oleh “Tiga Srangkai” yaitu Murtayiah (Surabaya), Chuzaimah (Gresik) dan Aminah mansyur (Sidoarjo). Pemikiran perintisan tersebut dilandasi perlunya wadah bagi para pemudi NU untuk bergabung dalam satu organisasi untuk memperjuangkan aspirasi wanita.

B. Struktur Organisasi dan Kepemimpinan Fatayat NU

Struktur organisasi Fatayat NU tidak berbeda dengan organisasi otonom yang lain yaitu :

- Tingkat Nasional (Pusat) ialah pimpinan tertinggi Fatayat NU
- Tingkat Propinsi
- Tingkat Kabupaten
- Tingkat Kecamatan
- Tingkat Desa atau Kelurahan

c. Tujuan Fatayat NU adalah :

- Menciptakan pemuda yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, beramal baik, cakap dan bertanggung jawab
 - Terciptanya rasa kesetiaan terhadap azaz, aqidah dan tujuan NU dalam menegakkan syari'at islam
 - Terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata serta diridhoi Allah SWT
- Fatayat NU sebagai organisasi perjuangan memiliki landasan perjuangan yang bertitik tolak dari cita-cita dan tujuan

d. Adapun landasan perjuangan Fatayat NU meliputi :

- Syari'ah islam
- Amar ma'ruf nahi munkar
- Bermanfaat
- Usaha bersama dengan bersifat kekeluargaan
- Demokrasi
- Percaya pada diri sendiri

e. Peranan Fatayat NU dalam pembangunan Nasional :

- Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, Fatayat NU mengadakan konsolidasi internal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas anggota
- Sebagai organisasi keagamaan, Fatayat NU berperan mengembangkan ajaran islam ahlusunnah waljama'ah sebagai upaya menjawab tantangan zaman dan sekaligus penangkal negatif akibat kemajuan iptek

- Sebagai organisasi kepemudaan, Fatayat NU telah menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya membangun warga Negara RI dalam sektor kesehatan serta mencari solusi tentang masalah kesehatan balita dan krisis ekonomi
- Sebagai organisasi wanita, Fatayat NU sangat peduli terhadap peningkatan kualitas wanita Indonesia, agar para wanita Indonesia mampu berperan sejajar dengan kaum pria

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Fatayat NU menjadi Gerakan Sosiofeminisme Progresif dan Perannya

Berdirinya Fatayat NU tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Nahdhatul Ulama (NU) sebagai organisasi induknya, dan sejarah Indonesia sebagai tanah airnya. Akan tetapi jika melihat latar belakang berdirinya Fatayat NU khususnya tidak bisa lepas dari beberapa faktor, diantaranya adalah faktor pendidikan dan sosial, khususnya pendidikan bagi anak-anak atau remaja perempuan, baik pendidikan yang sifatnya formal maupun non formal. Banyak perjuangan yang dilakukan oleh Fatayat .NU pada saat itu seperti perjuangan melawan keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan keterpurukan akibat penjajahan. Secara umum sejarah berdirinya Fatayat NU memiliki semangat yang sama dengan induknya, yaitu Nahdhatul Ulama. Fatayat NU memang dikenal sebagai organisasi perempuan keagamaan tradisional dan pada awalnya anggotanya adalah laki-laki yang memang secara khusus membahas isu-isu perempuan secara progresif.³⁴ Pada saat awal mula berdiri Fatayat NU memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang membahas masalah perempuan dalam kajian hukum islam dan masalah perjuangan kemerdekaan. Ini menjadi fokus Fatayat NU karena memang pada saat itu keadaan yang membentuk mereka harus bersikap seperti ini.

Sebagaimana organisasi lainnya yang selalu memiliki dinamika dalam setiap perubahannya, begitu juga yang dialami Fatayat. Fatayat yang dulu hanya membahas masalah-masalah keagamaan dan isu-isu perempuan yang sederhana kini sudah mulai

³⁴ <http://fatayat-nu.blogspot.co.id/2011/05/sejarah-kelahiran-fatayat-nu.html>

melakukan pergerakan yang massif, ini disebabkan oleh beberapa petinggi atau pembesar Nahdhatul Ulama seperti KH. Wahid Hasyim yang merupakan putra dari KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdhatul Ulama membolehkan perempuan menjadi hakim. Isu perempuan semakin mendapatkan perhatian ketika Kiai Dahlan mengusulkan berdirinya organisasi perempuan NU di Kongres NU ke XIII di Menes Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938. Kongres ini sangat penting karena mulai membicarakan tentang perlunya perempuan mendapatkan kesamaan hak untuk mendapatkan didikan agama melalui NU. Ketika itu kongres baru menyetujui perempuan untuk menjadi anggota NU yang hanya bisa menjadi pendengar dan pengikut dan tidak boleh duduk dalam kepengurusan.

Perkembangan penting juga terjadi kembali ketika dihelatnya Kongres NU ke XV di Surabaya pada tanggal 5-9 Desember 1940. Ketika itu terjadi perdebatan sengit merespon usulan agar anggota perempuan NU mempunyai struktur pengurusnya sendiri di dalam NU. Kiai Dahlan termasuk mereka yang gigih memperjuangkan agar usulan tersebut diterima. Hingga sehari sebelum kongres berakhir, peserta tidak mampu memutuskan hingga akhirnya disepakati untuk menyerahkan keputusan akhirnya pada Pengurus Besar Syuriah NU. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kiai Dahlan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah. Setelah didapatkan, maka peserta kongres pun dengan mudah menyetujui perlunya anggota perempuan NU untuk memiliki struktur kepengurusannya sendiri di dalam NU. Inilah yang menjadi nilai lebih pada diri Fatayat NU, bisa menjadi tempat sendiri dalam struktur Nahdhatul Ulama. Pergerakan Fatayat NU dari yang awalnya tradisional menjadi sedikit progresif dan mulai berkembang melakukan dinamikanya

sendiri atas nama Fatayat NU. Ini adalah dinamika yang terjadi ketika Fatayat NU mulai berdiri.

Pada tahun 1954, saat Muslimat membicarakan perkawinan di bawah umur dan pemberantasan buta huruf, Fatayat NU terlibat juga secara intensif. Ada pleno dimana Fatayat-Muslimat akan bergabung. Kemajuan pemikiran yang muncul saat itu adalah adanya keputusan bahwa kalangan Muslimat dan Fatayat sudah harus diberi kesempatan sebagai pemimpin publik dalam arti sesungguhnya. Bukan saja di intern Muslimat dan Fatayat, tapi di masyarakat secara luas. Karena itu, sudah muncul tuntutan agar kalangan Muslimat juga berhak dicalonkan menjadi anggota legislatif. Pada tahap ini perkembangan Fatayat NU sangat signifikan berubah dari yang awalnya memfokuskan pada masalah hukum islam atau syariah saja kemudian beranjak kepada masalah yang agak kompleks seperti mulai membicarakan masalah pemberantasan buta huruf yang terjadi pada masyarakat pada saat itu. Ini jelas berbeda dan memang Fatayat NU sudah dikatakan agak progresif walaupun belum banyak terlihat atau belum pada semua sisi. Pada Mukhtamar NU di Semarang tahun 1979, Kongres Muslimat-Fatayat digabung lagi. Perubahan terjadi di Fatayat NU. Sebagian besar pengurus PP Fatayat merasa sudah terlalu tua menjadi Fatayat. Terjadi alih generasi dari Ibu Malichah Agus ke Ibu Mahfudhoh.

Perubahan drastis dimulai saat Fatayat dipimpin Ibu Mahfudhoh. Pada masa kepemimpinan beliau, Fatayat mempunyai program yang disebut Kelangsungan Hidup Anak (KHI). Program itu sebenarnya punya Muslimat, Pembinaan Karang Balita, tapi

kemudian diserahkan ke Fatayat dan diformulasikan dalam bentuk kerja sama dengan UNICEF dan DEPAG dalam bentuk KHI. Dokumen tertulis penyerahannya ada.

Dalam pelaksanaan KHI, ada dana untuk pengurus. Saya melihat sebagai awal perubahan karena Fatayat akhirnya mengetahui uang dan ukurannya semua uang, sehingga melupakan asal muasal jati dirinya. Perubahan lain adalah kerenggangan hubungan Fatayat-Muslimat. Tak ada hubungan yang kental lagi sebagaimana sebelumnya. Selain itu, mulai terjadi konflik internal antarMuslimat-Fatayat. Semua itu berlangsung sampai sekarang. Mungkin saja sumber konfliknya hilang, tapi yang tersisa hingga sekarang adalah faktor kedekatannya pun hilang. Apalagi Fatayat merasa sudah sejajar dengan Muslimat dan lembaga-lembaga otonom lainnya. Padahal, Fatayat lahir karena Muslimat, bukan karena NU. Ketika Fatayat menjadi badan otonom, dan bukan lagi sebagai subordinat Muslimat, saat itu Kiai Wahab Chasbullah mengatakan “ Fatayat itu dulu digendong-gendong, direngkuh-rengkuh, tapi kok maunya memisahkan diri saja “. Itu yang tak terekam dalam sejarah Fatayat yang sesungguhnya. Sampai sini sebenarnya sudah mulai terlihat jelas bahwa sesungguhnya Fatayat NU melakukan Transformasi diri dalam upaya melakukan pengembangan organisasinya sekaligus melakukan pemberdayaan anggotanya yang tujuannya tidak lain adalah melakukan kontribusi yang nyata bagi masyarakat pada saat itu.

Pada era saat ini Fatayat NU jelas terlihat sudah lebih progresif lagi karena didukung dengan sumber daya dan teknologi yang memadai dalam rangka melakukan pemberdayaan anggotanya khususnya dalam melakukan pembinaan terhadap para kualitas para perempuan Fatayat NU itu sendiri.

2. Pandangan Ideologis terhadap Masalah Sosial

Ciri peradaban manusia yang bermasyarakat senantiasa ditandai dengan keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Ini berarti bahwa manusia tidak bisa melepaskan dirinya untuk tidak terlibat pada kegiatan-kegiatan berorganisasi. Manusia hidup dilahirkan dalam organisasi, dididik oleh organisasi, dan hampir semua manusia menggunakan waktu hidupnya bekerja untuk organisasi. Waktu senggangnya dipergunakan untuk bermain-main, berdoa, memenuhi hajat hidup (sandang, pangan, papan) dalam suatu organisasi, demikian pula manusia bakal mati dalam suatu organisasi.³⁵ Sesungguhnya tantangan Fatayat NU ke depan melebihi perdebatan kepentingan politik usia yang biasanya hanya merefleksikan kepentingan calon yang akan maju. Sehingga isu yang berkembang tidak hanya urusan batas usia kandidat, melainkan persoalan strategis Fatayat ke depan yang membutuhkan pemikiran-pemikiran dan urun rembuk dari seluruh peserta kongres.³⁶

Pertama adalah manifestasi Islam nusantara. Sebab terminology ini mungkin masih belum begitu familiar dalam rangka membangun wawasan yang kemudian mampu dikonseptualkan dalam perencanaan program Fatayat ke depan. Untuk itu diperlukan pemahaman komprehensif secara substansial dan prosedural agar mampu menjadi *ruh* perjuangan peran progresif Fatayat dalam mengembangkan nilai keIslaman melalui kiprah Fatayat. Pergulatan Islam dan globalisasi telah menjadi isu lama dalam perjalanan Fatayat selama ini, namun tetap menjadi tantangan tersendiri. Oleh sebab itu, gerakan keagamaan dan keIslaman Fatayat hendaknya berinfiltrasi secara strategis

³⁵ Ahdiah, Indah, *Organisasi Sosial sebagai Modal Sosial*, (Jurnal Academia : Bandung, vol. 03 Pebruari 2011), hal 523

³⁶ <http://www.nu.or.id/a.public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,61942-lang.id-c,kolomt,Agenda+Strategis+Fatayat+NU-.phpx>

dengan keIslaman *resources* NU yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Masihkah kita memegang prinsip ke-NU-an dalam berbangsa dan bernegara dengan mengimplementasikan *Tawassuth*, *Tawazun*, *I'tidal* dan *Tasamuh* agar melandasi pola gerak Fatayat selama ini. Sudahkah melihat *tawassuth* atau *Wasathiyah* dalam meniscayakan untuk tidak ekstrem ke kanan atau pun ke kiri. Bersikap bijak di tengah-tengah dua polar yang bertentangan. Empat konsep utama yang diusung Fatayat NU memiliki alasan tersendiri mengapa mereka menggunakan landasan tersebut, bukan tanpa alasan dibuatnya empat landasan tersebut.

Sudahkah *tawazun* yang meniscayakan untuk proporsional dalam berpikir, bertindak dan berucap, menggunakan akal dan naql dalam porsi yang sama besar dan menganggapnya sama terhormat. Kemudian sudahkah konsep *i'tidal* atau adil dan tegak lurus yang meniscayakan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Berani menyalahkan golongan yang terbukti salah, siapa pun ia dan berani membela golongan yang terbukti benar, siapa pun ia. Oleh sebab di dalam tubuh Aswaja tidak ada keraguan untuk saling mengkritik dan membenahi bila dirasa ada yang menyimpang dari garis keadilan, sebab kritik semacam itu memang bukan hal yang tabu. Dan terakhir adalah sudahkah konsep *tasamuh* atau toleran menjadi landasan yang benar-benar diimplementasikan dalam tubuh Fatayat NU. Tidak ada kelompok Islam yang lebih toleran daripada yang menganut paham Aswaja karena Aswaja sendiri adalah rumah besar dari ribuan tradisi dan perbedaan pendapat.

Saat ini Fatayat masih melihat agenda kearifan lokal yang bersumber dari nilai Islam masih yang menjadi benteng Islam nusantara dan bagian dari manifestasinya, maka

strategi gerakan ini harus mampu diwujudkan dalam peta gerakan global di level dunia. Hal ini juga pernah dituangkan dalam beberapa media mengenai bagaimana nilai-nilai yang ada pada Fatayat NU mampu menjadi sumber nilai dan inspirasi bagi siapapun.³⁷ Aktivitas keagamaan Fatayat seperti pembacaan Barjanji (Dibaan) mengagungkan Nabi Muhammad SAW di beberapa tempat yang digawangi majelis taklim Fatayat haruslah menjadi *tauladan* bahkan *role of model* gerakan keIslaman yang mampu menumbuhkan persaudaraan, keharmonisan antar masyarakat, desa, bahkan antar suku bangsa sehingga dapat meminimalisir persoalan konflik, kerusuhan, dan perpecahan. *Kedua* aktualisasi khittah NU ke 26 sebagaimana salah satu butirnya membebaskan warga NU menyalurkan aspirasi *nasbu al-imamah* melalui partai politik, menunjukkan adanya *starting point* (titik awal) bagi tumbuhnya kesadaran berdemokrasi Pancasila secara lugas. Meskipun diakui, masih ada kebingungan kecil di kalangan awam yang memang terbiasa mengikuti panutannya, namun Khittah memproses tumbuhnya kesadaran berpolitik secara struktural mau pun kultural. Kemudian akan menyusul pula kesadaran berbangsa dan bernegara secara dinamis dan plural (lihat tausiyah KH MA Sahal Mahfudh, aktualisasi Khittah 1926 tahun 2004). Hal ini membuktikan tantangan Fatayat adalah menjadi perekat bangsa di atas perbedaan pandangan dan kendaraan politik yang sangat beragam. Sehingga menghindari dominasi dan tirani minoritas bagi perbedaan politik di tubuh NU.

Politik Fatayat adalah membangun dan memproses sekaligus suplayer bagi tumbuh kembangnya politik perempuan di Indonesia. Melalui NU, Fatayat mampu menjadi labolatorium kaderisasi perempuan politik di seluruh partai politik di Indonesia, serta mampu memiliki peta distribusi kader baik yang bergerak di ranah eksekutif,

³⁷ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/22/nv1hng335-fatayat-nu-fokus-pada-ekonomi-dan-kesehatan>

legislative dan yudikatif serta berbagai Komisi dan lembaga Negara yang membutuhkan kader-kader terbaik NU. Inilah yang disebut sisi progresif perempuan NU yang meletakkan peran politik Fatayat bukan lagi mempertentangkan jubah partai politik tertentu di dalam organisasi Fatayat, namun visi gerakan Fatayat dalam perempuan berpolitik haruslah mengakomodir dan mengayomi realitas kepentingan politik perempuan melalui *design* politik Fatayat. Sebab politik perempuan merupakan *asset* dan strategi bagi gerakan perempuan untuk melakukan advokasi dan intervensi system dalam membela keadilan dan martabat perempuan.

Ketiga adalah penataan organisasi berbasis manajerial. Tantangan modernisasi organisasi sangat terasa manakala tuntutan pengembangan organisasi ini tidak berbanding dengan apa yang mampu dilakukan. Secara kuantitas kaderisasi dan formalisasi lembaga memiliki jenjang kaderisasi secara mapan dengan jumlah 580 cabang se Indonesia. Namun hasil verifikasi, system kaderisasi agak tersendat dan kurang memiliki control yang jelas dalam melewati penjenjangannya. Demikian pula disusul oleh struktur kepengurusan yang aktif saat ini Fatayat se Indonesia mungkin hanya tinggal 300 cabang di 33 provinsi. Dengan demikian, program kerja Fatayat selama ini semestinya tetap berpatokan pada kebutuhan *fiscal* organisasi di atas, yakni terbangunnya kualitas kader sebagai upaya pengembangan kuantitas kader. Dapat kita bayangkan perempuan muda NU yang memiliki sumberdaya dan memiliki progresifitas tinggi melakukan gerakan *real* di masyarakat sebagai bentuk pengabdian NU selalu hadir untuk umat manusia.³⁸ Semua konsep diatas adalah konsep real yang memang sudah diimplementasikan oleh Fatayat NU secara umum oleh Nahdhatul Ulama. Nilai tersebut

³⁸ <http://www.nu.or.id/a.public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,61942-lang.id-c,kolomt,Agenda+Strategis+Fatayat+NU-.phpx>

sudah sangat cocok dengan keadaan dan kondisi yang ada di Indonesia, ulama yang sejatinya memang sebagai penuntun bagi masyarakat sudah sangat bijak merumuskan nilai-nilai yang ada di dalam tubuh Nahdhatul Ulama khususnya Fatayat NU itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Fatayat telah menjadi sebuah gerakan sosiofeminisme yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu sebuah gerakan sosial perempuan yang peduli terhadap masalah sosial. Fatayat sebagai organisasi perempuan berbasis keagamaan mampu menjadikan dirinya sebagai sebuah organisasi yang peduli terhadap masalah atau problematika yang ada. Ada beberapa faktor yang menjadikan Fatayat NU sebagai sebuah gerakan sosial yang peduli terhadap masalah sosial, diantaranya adalah Fatayat NU mampu memberikan sebuah wacana bahwa organisasi dengan latar belakang perempuan pun mampu melihat adanya sebuah masalah dan juga mampu memberikan sebuah solusi yang dapat memberikan manfaat bagi siapapun. Yang kedua adalah sebagai sebuah organisasi dengan latar belakang perempuan mampu memberikan sebuah program yang mampu menjadikan setiap anggotanya berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
2. Diantara nilai-nilai yang ada dalam gerakan sosiofeminisme adalah nilai kepedulian sehingga Fatayat NU sebagai sebuah gerakan sosiofeminisme mampu peka dan peduli terhadap kondisi sekitar. Gerakan sosial disini bukan lagi hanya kepada beberapa elemen masyarakat saja, akan tetapi kepada semua elemen masyarakat, ini menjadi sebuah hal yang menarik karena walaupun sebagai organisasi perempuan tetapi tetap mampu mengakomodasi dan menjadi harapan bagi masyarakat.

3. Ada beberapa program unggulan yang mampu menjadikan anggotanya (Fatayat NU) berdaya akan tetapi bukan berarti sebelumnya Fatayat belum berdaya. Ini difokuskan ke hal-hal yang belum banyak organisasi atau lembaga sentuh, diantaranya adalah :

A. Reproduksi Perempuan

Dalam hal ini Fatayat NU memang memfokuskan dirinya pada urusan-urusan perempuan satu hal diantaranya adalah tentang reproduksi perempuan walaupun ada banyak lagi yang menjadi fokus Fatayat NU. Dalam kepengurusan sebelumnya masalah yang diangkat adalah masalah khitan perempuan akan tetapi untuk kepengurusan saat ini mereka memfokuskan dirinya pada urusan reproduksi perempuan, adapun program yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah adanya sosialisasi terkait program reproduksi, dan banyak program lainnya yang mendukung untuk program tersebut.

B. Dakwah Pemerintahan

Pada intinya adalah dakwah ini dilakukan dengan adanya kerjasama antara Fatayat Nu dengan Lembaga Pemerintahan atau juga Instansi Dinas bahkan juga dengan Kementerian seperti yang selama ini dilakukan dengan dibuatnya MoU antara Fatayat NU dengan Kementerian Agama terkait usia nikah dan reproduksi.

C. Pelatihan Softskill

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap Gerakan Sosifeminisme Fatayat NU dalam pemberdayaan perempuan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pembaca diharapkan tidak hanya mengetahui isi dari skripsi ini akan tetapi mampu menjadikan referensi bagi pembaca dalam mencari konsep pemberdayaan perempuan.
2. Kepada mahasiswa diharapkan mampu membuat kelompok-kelompok diskusi membicarakan tema tentang gerakan sosial khususnya perempuan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengadakan penelitian lebih mendalam tentang gerakan sosial dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik.